

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan pesat, masyarakat yang dulunya tradisional kini terpaksa mengalami transisi dari modernitas ke neomodernitas. Bidang ekonomi sedang mengalami masa kemajuan yang luar biasa pesat seiring dengan datangnya era globalisasi. Perubahan-perubahan tersebut di atas memfasilitasi interkoneksi pergerakan ekonomi antara dua negara.<sup>1</sup>

Banyak transaksi, terutama yang melibatkan perdagangan dan persewaan, telah berpindah dari dunia nyata ke dunia maya; ini adalah kecenderungan yang lazim di platform online<sup>2</sup> Dengan disahkannya undang-undang ini, kerangka hukum yang sudah ketinggalan zaman telah dievaluasi kembali dan diubah untuk mempertimbangkan situasi digital modern. Area yang menjadi perhatian penulis adalah perdagangan opsi biner, yaitu pada platform Binomo.

Trader menggunakan binary options sejenis instrumen perdagangan online, untuk memperkirakan atau berspekulasi mengenai arah pergerakan

---

<sup>1</sup>Ahmad Firjatullah Hasanuddin, “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option”. Jurnal Hukum, Universitas Islam Negeri Malang (2019), hal. 1-2.

<sup>2</sup> Zulfatul Mukarromah, “Forex Online Trading (FOT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Telaah Kasus Para Pengguna FOT)”, At-Turost: Journal of Islamic Studies (2020),hal55.

harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Faktanya, mempelajari cara memperdagangkan binary options cukup mudah. Pendaftaran dengan penyedia binary options dan deposit adalah semua yang diperlukan pengguna. Selama transaksi, peserta akan memilih indeks aset, yang dapat terdiri dari komoditas, indeks saham, atau mata uang. Setelah memilih indeks aset, pengguna melanjutkan memasukkan modal yang diperlukan untuk staking. Karakteristik spesifik aset menentukan jumlah minimum modal yang dibutuhkan. Transaksi ini menghasilkan keuntungan berkisar antara 60% hingga 90%, namun tidak ada yang 100%. Pengguna kemudian dapat memilih dari berbagai durasi transaksi, termasuk detik, menit, jam, dan hari.<sup>3</sup>

Binary option juga dikenal sebagai opsi biner melibatkan prediksi pergerakan nilai suatu aset selama periode waktu tertentu menggunakan sistem biner. Dengan memperkirakan secara akurat volatilitas harga aset referensi selama durasi tertentu, seseorang dapat memperoleh keuntungan yang telah ditentukan (Fixed Payout) atau mengalami kerugian sebesar nilai yang dinyatakan. Untuk mendanai suatu posisi, investor diharuskan menyetor sejumlah uang tertentu ke platform Binary option berbasis internet. Terakhir, pengguna harus membuat perkiraan selama jangka waktu yang ditentukan, apakah harga indeks akan lebih tinggi atau lebih rendah

---

<sup>3</sup> Tendi Mahadi, Mengenal Binary Option Trading Ilegal yang Merugikan Penggunaanya, diakses dari <https://investasi.konten.co.id/news/mengenal-binary-option-trading-ilegal-yang-merugikan-penggunaanya>, diakses pada 13 April 2022, jam 09.30 WIB

dari harga pada awal transaksi pada saat durasi berakhir. Pengguna akan menghasilkan keuntungan sesuai dengan perhitungan awal jika perkiraannya akurat. Namun jika terjadi kesalahan, pengguna akan mengalami kerugian dan kehilangan modal yang digunakan.

Sebagaimana tercantum dalam Huruf d Ayat 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, (2):

“Mempengaruhi pihak ketiga secara tidak bertanggung jawab atau langsung untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, atau kontrak derivatif lainnya melalui penggunaan paksaan atau ekspektasi keuntungan yang tidak wajar.”

Mereka yang yakin bahwa afiliasi Binary option telah menyebabkan kerugian bagi mereka dapat melaporkannya ke polisi untuk tindakan hukum. Binary option adalah kelas instrumen keuangan di mana peserta ditugaskan pada salah satu dari dua kemungkinan hasil dalam jangka waktu tertentu. Kedudukan hukum *binary option* sebagai komoditas perdagangan berjangka masih menjadi bahan perdebatan yudisial yang sedang berlangsung. Untuk Mengenai persyaratan objektif kontrak, kontrak tersebut harus memenuhi justifikasi hukum yang menimbulkan kekhawatiran mengenai validitas kontrak dalam konteks spesifik Binary option. Ketika mempertimbangkan perlindungan konsumen untuk Binary

option, tidak adanya izin dari Bappebti menciptakan ambiguitas baik dalam bidang hukum maupun praktis.

Untuk sementara, barang dagangan yang dimaksud terdiri atas barang, jasa, kepentingan, atau turunannya yang dapat dipertukarkan. Aset-aset tersebut dikategorikan sebagai kontrak derivatif, antara lain kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan perjanjian sejenis lainnya. Kontrak dialihkan sebagai pengganti komoditas fisik dalam transaksi yang melibatkan komoditas. Sebaliknya, kontrak berjangka adalah perjanjian kontrak untuk membeli atau menjual komoditas di kemudian hari, yang mencakup spesifikasi mengenai kuantitas, kualitas, jenis, lokasi, dan waktu penyerahan<sup>4</sup>

Investasi pada komoditas finansial dan investasi pada komoditas fisik berupa produk (riil) merupakan dua jenis investasi dalam perdagangan berjangka. Komoditas keuangan diinvestasikan pada lembaga yang bukan lembaga perbankan atau lembaga non-perbankan. Perdagangan berjangka merupakan tren investasi kontemporer dan bentuk aktivitas di sektor keuangan non-perbankan.

Proses perdagangan komoditas finansial berbeda dengan komoditas fisik. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti karakteristik komoditas yang ditransaksikan, pokok bahasan kontrak, lokasi

---

<sup>4</sup>Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232, Ps.1 angka 5



transaksi, mekanisme transaksi, dan metode transaksi. Perdagangan komoditas fisik disebut dengan perdagangan kontrak primer, sedangkan perdagangan berjangka yang melibatkan komoditas finansial dikenal dengan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).<sup>5</sup> Pedagang dan vendor berjangka tidak selalu bertemu langsung di pasar fisik sebaliknya, mereka melakukan transaksi berbasis elektronik melalui jaringan komunikasi. Pasar berjangka komoditas keuangan ditandai dengan perdagangan yang berkelanjutan sepanjang hari. Berbeda dengan pasar lain di mana transaksi fisik terjadi antara penjual dan pembeli, pasar ini melarang pelaku pasar untuk bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi yang canggih. Komunikasi yang disengketakan berkaitan dengan jaringan internet (dunia maya) atau sistem *trading* online yang sering digunakan bersamaan dengan *trading* berjangka.<sup>6</sup>

Pemberian wewenang, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Perdagangan Berjangka, termasuk yang dilakukan secara online, berada pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

---

<sup>5</sup> Pengertian Sistem Perdagangan Alternatif menurut Pasal 1 angka 10 -Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah

<sup>6</sup>Siska Irawati, 2015, "Tinjauan Yuridis Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (Foreign Exchange Melalui Online Trading System) (Penelitian di PT. Millenium Penata Futures Yogyakarta)", Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm.16. Dikutip pada laman website : <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, diakses pada tanggal 02 Juli 2022.

(Bappebti). Pengawasan, pengarahan, dan pengaturan oleh Bappebt<sup>7</sup> memang benar, upaya ini tidak lain hanyalah upaya mencapai tujuan atau ambisi negara untuk menstimulasi aktivitas sektor perdagangan. Kegiatan *trading* dioptimalkan kontribusinya terhadap kemajuan suatu bangsa. Proses penegakan hukum diperlukan karena *trading* komoditas yang merupakan sumber daya alam berdampak terhadap hajat hidup banyak orang dan harapan masyarakat yang semakin besar terhadap dunia investasi di era peningkatan transparansi globalisasi.<sup>8</sup>

Dalam proses penegakan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.10

Tahun 2011 :

“Pengawasan, pengarahan, dan pengembangan kegiatan *trading* berjangka sehari-hari menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti”.<sup>9</sup>

Ketentuan Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2011 :

Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan oleh Bappebti dilakukan dengan tujuan :

- a. Menjamin terselenggaranya kegiatan perdagangan berjangka secara sistematis, berkeadilan, produktif, transparan, dan kondusif bagi persaingan yang sehat
- b. Menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka

<sup>7</sup>Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perubahan UU Perdagangan Berjangka Komoditi-Perubahan berbunyi : “Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti”.

<sup>8</sup> Jusuf Anwar, Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, (Bandung : PT. Alumni 2012), hlm. 219.

<sup>9</sup>Indonesia (1),*Ibid.*

- c. Melaksanakan aktivitas perdagangan berjangka untuk memitigasi risiko harga dan menetapkan harga yang transparan.<sup>10</sup>

Pemantauan dan pengaturan proses hukum ini akan menjadi komponen penting dalam penegakan hukum yang efisien. Karena penawaran produk, investasi, dan aktivitas bisnis online yang merugikan di sektor Perdagangan Berjangka masih marak saat ini, Bappebti mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan platform tersebut, terlepas dari apakah mereka telah memperoleh izin usaha dari Bappebti atau belum. . Bappebti secara rutin memantau aktivitas entitas dan platform yang tidak memiliki otorisasi atau persetujuan. Organisasi terlarang sering kali mempromosikan peluang bisnis dan investasi online melalui situs dan situs web mereka. Untuk memikat calon pelanggan, mereka sering kali membuat klaim menarik mengenai keuntungan besar, pendapatan tetap, atau bagi hasil. Kegiatan ini juga menjadi sorotan publik dalam bentuk pengaduan. Investasi adalah upaya proaktif yang mentransfer sejumlah dana tertentu dari konsumsi atau penggunaan saat ini untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Berinvestasi pada kenyataannya memerlukan optimisme mengenai masa depan. Sesuai dengan filosofi investasi yang berlaku, aktivitas investasi selalu memerlukan alokasi waktu, sumber daya finansial, dan upaya mental. Harapan akan keuntungan yang lebih besar di masa depan tentu saja disebut dengan istilah Return dalam konsep investasi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Indonesia (1),*Ibid*

<sup>11</sup>Eka Putri, Dianata, 2002. Berburu Uang di Pasar Modal. Jakarta : Effhar

Meskipun individu mungkin mengalokasikan investasi mereka dengan tujuan yang berbeda-beda, tujuan mendasar dari investasi adalah untuk menghasilkan keuntungan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan investor. Tidak diragukan lagi, setiap orang mendambakan kehidupan yang sejahtera di masa depan akibatnya, mereka rela menanggihkan keinginan-keinginan mereka saat ini demi melakukan investasi yang dapat mendatangkan kemakmuran.

Bappebti, badan pengelola yang bertanggung jawab atas *binary option*, telah menerapkan langkah-langkah untuk mencegah akses ke situs-situs yang terkait dengan aktivitas *binary option*, termasuk Binomo. Menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs tidak serta merta menghasilkan penyelesaian permasalahan yang ada. Afiliasi yang terus-menerus menegaskan bahwa aplikasi tersebut sah, merupakan investasi, dan termasuk dalam kategori perdagangan harus menghadapi pengawasan tambahan dari pihak berwenang, karena mereka berpotensi menjerat warga negara biasa. Akibatnya, Indra Kenz dan Doni Salamanan, dua afiliasi terkemuka, terjerat dalam skandal *binary option* yang berkedok investasi dan perdagangan<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Cnnbc, Indra Kenz Dan Doni Salamanan, Tersangka Penipuan 'Binary Option' Yang Diduga Lakukan Pencucian Uang," n.d, Dikutip pada laman website : <http://cnbc.kasusbinaryoption.com/>, diakses pada tanggal 02 Juli 2022.



Kasus ini menunjukkan bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi untuk mempertanyakan apakah perbuatan seseorang mendukung suatu kejahatan (medepreger) atau merupakan suatu taruhan:

1. Adanya kolaborasi yang disadari, meskipun kesepakatan tidak selalu tercapai sebelumnya.
2. Kejahatan sejati menjadi nyata ketika dua keinginan yang berlawanan bertemu.
3. Implementasi fisik bersama dan implementasi sadar afiliasi sehingga afiliasi dapat dengan mudah memahami tujuan Binomo, yaitu untuk meningkatkan jumlah peserta dalam kegiatan ini.

Banyak investor saat ini mengalami berbagai jenis kerugian pada investasi perdagangan berjangka mereka karena kejadian terkini. Umumnya, kerugian yang terjadi adalah akibat dari kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari pihak broker atau perwakilannya. Pialang terlibat dalam aktivitas penipuan ketika transaksi dilakukan secara tidak benar dalam praktiknya. Wanprestasi biasanya bermanifestasi sebagai tindakan sepihak yang mencakup kewajiban kontrak dan transaksi. Membangun perlindungan hukum bagi investor dan menjaga kepentingan mereka dari tindakan yang dapat merugikan nasabah merupakan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan tentang trading *binary option* tersebut yang kemudian dikaitkan dengan kedudukan hukum bagi para investor sehingga penulis akhirnya memutuskan untuk mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRADING ILEGAL *BINARY OPTION* BERBASIS APLIKASI BINOMO”**

#### B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana dalam *trading ilegal binary option* pada Binomo berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 57 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi investor dalam *trading ilegal binary option* pada Binomo ?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

Tinjauan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam *trading ilegal binary option* pada Binomo.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini di samping mempunyai kegunaan yang ingin dicapai juga diharapkan memberi manfaat dalam 3 aspek sebagai berikut:

### 1. Akademik

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi para pedagang yang melakukan trading *binary option* ilegal, memberikan tambahan wawasan mengenai status hukum investor dalam trading *binary option* ilegal di Binomo, dan menjadi bahan bacaan dan bahan penelitian mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana para pedagang yang terlibat dalam trading *binary option* ilegal. Selain itu, penulis bercita-cita untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan dengan menyajikan kemajuan ilmiah dan teoritis yang meningkatkan pemahaman. Selain itu, mereka berupaya menghasilkan ide dan perspektif baru yang dapat menjadi bahan dasar untuk penelitian selanjutnya, yang pada akhirnya memfasilitasi pengembangan konsep ilmiah dalam proses pendidikan bagi para profesional hukum, akademisi, dan praktisi.

### 2. Kelembagaan

Dengan harapan dapat membantu para investor yang ingin trading dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap undang-undang yang sedang berkembang, maka skripsi ini dimaksudkan untuk menyumbangkan pemikiran yang akan membantu pemerintah dalam mengembangkan pemahaman tentang hukum yang sedang berkembang. hukum.

### 3. Sosial/Masyarakat

Bagi masyarakat umum yang membaca skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, meningkatkan pemahaman mereka, dan memperluas perspektif mereka mengenai kedudukan hukum investor yang terlibat dalam trading *binary option* ilegal, serta mekanisme akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan kriminal dalam hal ini. domain. Dengan demikian, mereka akan lebih siap menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi tanpa menemui hambatan apa pun. Lebih lanjut, dengan memahami Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 secara komprehensif, penulis berharap masyarakat semakin waspada dan tanggap dalam berpartisipasi dalam urusan publik.

